

ANALISIS SITUASI PANGAN DAN GIZI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN OPERASIONAL KETAHANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

(*Analysis of Food and Nutrition Situation for Formulating Operational Policy of Food and Nutrition Security in West Lampung District*)

Tabrani Mahfi¹, Budi Setiawan², dan Yayuk Farida Baliwati²

¹ Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan (MKP), Sekolah Pascasarjana, IPB.

² Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), IPB

Tel: 0251-8628304/8621258; Fax: 0251-8625846/8622276.

ABSTRACT

The objectives of this research were: 1) to know the situation of food and nutrition security in West Lampung District, 2) to know the strategic circumstance of food security, and 3) to formulate operational policy recommendation for food and nutrition security in West Lampung District. The primary data was obtained by interview and questionnaire filling in order to formulate alternatives of food security operational policy in West Lampung District. The secondary data was used to know the actual condition of food and nutrition security by using descriptive analysis and to formulate strategic circumstance of food security by using SWOT analysis. The result of the study showed that the situation of food security based on availability, shown by energy availability was 140% of Recommended Dietary Allowance (RDA) for energy (2 200 kcal/capita/day), while the protein availability was 74.28 gram/capita/day. The consumption in West Lampung District reached 95.6% of RDA for energy in quantity, but only reaches Desirable Dietary Pattern Score 78.8 in quality. The strategic circumstance of food security in West Lampung District was categorized in quadrant II (supporting diversification strategy). Thus, the first priority of policy recommendation is development of human resource.

Keywords: food security, nutritional status.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 pasal 13-14 menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dibidang ketahanan pangan adalah melaksanakan kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di wilayah masing-masing. Ketahanan pangan termasuk urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (PP No. 38 Tahun 2007) Untuk memperbaiki sinergi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan masyarakat, serta efektivitas kebijakan dan kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, diperlukan acuan yang memuat kebijakan, strategi, hingga kegiatan operasional, dalam mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan penelitian secara umum untuk merumuskan kebijakan operasional ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2008-2013. Secara khusus bertujuan 1) menganalisis situasi ketahanan pangan dan gizi di Kabu-

paten Lampung Barat; 2) menganalisis lingkungan strategis ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat; 3) merumuskan rekomendasi kebijakan operasional ketahanan pangan dan gizi.

METODE PENELITIAN

Desain dan Tempat Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional study* dan dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan selama 2 bulan.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu: ketersedian pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, potensi agroekosistem, demografi, dan status gizi. Data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner dan wawancara langsung dengan pejabat pada masing-masing instansi yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten; yaitu: 1) Wakil Bupati; 2) Wakil Ketua DPRD; 3) Sekretaris Daerah; 4) Kepa-

la Bappeda; 5) Kepala Dinas TPH; 6) Kepala Dinas Perkebunan; 7) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8) Kepala Dinas Perikanan; 9) Kepala Dinas Kehutanan; 10) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 11) Kepala Dinas Koperasi; 12) Kepala Dinas Kesehatan; 13) Kepala Badan Ketahanan Pangan; dan 14) Kepala Divisi Dolog. Data sekunder diperoleh dari dinas instansi terkait dan studi pustaka.

Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder digunakan untuk mengetahui kondisi aktual ketahanan pangan yang di-analisis secara deskriptif, dan merumuskan lingkungan strategis ketahanan pangan, yang dilakukan dengan pendekatan SWOT. Lingkungan strategis faktor internal yang terdiri atas: 1) kekuatan (*strengths*); 2) kelemahan (*weaknesses*) dan faktor eksternal yang terdiri atas 1) peluang (*opportunities*); 2) ancaman (*threats*). Data primer hasil wawancara dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) (Marimin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian adalah 495 040 Ha, luas lahan yang belum dimanfaatkan seluas 14 752 Ha (sementara tidak diusahakan) berupa lahan kering. Sedangkan luas lahan yang telah dimanfaatkan adalah 480 288 Ha berupa; lahan pekarangan 13 784 Ha, kebun/ladang 33 600 Ha, huma 12 224 Ha, padang rumput 695 Ha, hutan rakyat 24 211 Ha, hutan negara 267 801 Ha, perkebunan 79 216 Ha, rawa 990, kolam 1 126 Ha, lain-lain 26 101 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2005 sebanyak 393 520 jiwa (60 879 KK), kepadatan penduduk 217.13/km², tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1.39% (BPS Lampung Barat, 2007).

Keragaan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

Ketersediaan pangan

Jumlah kalori yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2007 adalah sebesar 3 100 kkal per kapita per hari. Total protein yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2007 sebanyak 74.28 gram per kapita per hari. Ketersediaan protein hewani adalah 12.14 gram atau 21.29%. Kontribusi protein terbesar berasal dari kelompok padi-padian yaitu 62.14 gram per

kapita per hari atau 109% dari total protein yang tersedia. Jumlah lemak yang tersedia untuk dikonsumsi pada tahun 2007 di Kabupaten Lampung Barat adalah 65.83 gram per kapita per hari, diantaranya 62 032 gram atau 94% berasal dari kelompok nabati. Kontribusi lemak terbesar didominasi oleh kelompok minyak dan lemak yang bersumber dari minyak goreng yaitu 49.81 gram per kapita per hari (BKP Lampung Barat, 2008).

Distribusi Pangan

Kondisi sarana prasarana secara umum belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan Lampung Barat. Kurangnya fasilitas sarana jalan dan angkutan menyebabkan mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan jalur produksi serta mengurangi pungutan resmi maupun pungutan lainnya disepanjang jalur distribusi dan pemasaran, yang dapat mengakibatkan biaya distribusi berbagai produk pangan menjadi tinggi. Sarana distribusi pangan seperti sarana penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat pedesaan dalam melakukan fungsi penyimpanan dan pengolahan untuk meraih nilai tambah dan posisi tawar yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Lampung Barat perlu memfasilitasi dan memberikan kemudahan investasi pembangunan sarana pengolahan dan penyimpanan hasil di pedesaan seperti lantai jemur gudang kelompok dan alat mesin pasca panen lainnya.

Tabel 1. Perbandingan Ketersedian Kalori Ideal dan Aktual Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007

No	Jenis Bahan Makanan	Ketersedian energi (kkal/hr/kap)		Tingkat Ketersedian energi (% AKE)	
		Ideal	Aktual	Ideal	Aktual
1	Padi-Padian	1 100	2 206	50	100.27
2	Umbi-umbian	132	120	6	5.45
3	Pangan Hewani	264	86	12	3.91
4	Minyak dan Lemak	220	442	10	20.09
5	Buah/ biji berminyak	66	0	3	0
6	Kacang-kacangan	110	11	5	0.5
7	Gula	110	86	5	3.91
8	Sayur dan buah	123	150	6	6.82
9	Lain-lain	66	0	3	0
		Total	2 200	3 101	100

Sumber: BKP LB, 2008

Keterangan: Ideal = angka WNPG (2004)

Perkembangan harga pangan pokok strategis di Kabupaten Lampung Barat tahun 2006 - 2008 cenderung stabil, kecuali harga daging, ikan cenderung meningkat, dan cabe merah berfluktuatif. Harga gabah tingkat petani juga cenderung stabil dan relatif sama dengan harga patokan pemerintah (HPP) (BKP Lampung Barat, 2008).

Konsumsi Pangan

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan pada tahun 2007 berdasarkan survei konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitas telah mencapai 95.6% (1 946.9 kkal/kap/hari), namun demikian secara kualitas baru mencapai skor PPH sebesar 78.8. Konsumsi kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, serta sayur dan buah di Kabupaten Lampung Barat telah melampaui standar, tetapi untuk kelompok pangan yang lain konsumsinya masih perlu ditingkatkan karena belum memenuhi standar.

Secara umum konsumsi pangan sumber energi penduduk Lampung Barat masih didominasi oleh padi-padian. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan konsumsi penduduk Lampung Barat terhadap padi-padian masih tinggi. Konsumsi padi-padian ini harus dikurangi dengan cara lebih banyak mengkonsumsi kelompok pangan umbi-umbian yang skor pencapaiannya baru sebesar 1.4 sehingga masih di bawah skor maksimal sebesar 2.5 penambahan konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian ini juga diharapkan akan mampu meningkatkan konsumsi energi penduduk Kabupaten Lampung Barat.

Status Gizi

Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi

secara kompleks. Terwujudnya ketahanan pangan akan berdampak kepada perbaikan status gizi. Penyebab langsung status gizi adalah asupan gizi dan penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung adalah; ketahanan pangan di keluarga, pola asuh anak, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan adalah terkait dengan ketersedian air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga (Azwar, 2004). Status gizi masyarakat Kabupaten Lampung Barat ditinjau dari pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan masih bermasalah, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan pada tahun 2007 berada dibawah 80%.

Hal ini disebabkan banyaknya daerah-daerah yang sulit terjangkau dan tidak adanya tenaga medis didesa. Dari sisi kesehatan lingkungan, 35.86% penduduk Lampung Barat masih memanfaatkan air sungai dan air dari sumber yang tidak terlindungi sebagai sumber air bersih (Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2007).

Dilihat dari proporsi bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) cenderung meningkat pada tahun 2005 sebesar 0.16% (14 kasus) dari 8 618 kelahiran, terjadi peningkatan pada tahun 2006 menjadi 0.22% (18 kasus) dari 8 192 kelahiran. Sedangkan tahun 2007 meningkat kembali 0.45% (37 kasus) dari 8 199 kelahiran. Proporsi gizi buruk di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung meningkat. Tahun 2006 yaitu: gizi buruk sebesar 43 kasus dan gizi kurang 62 kasus. Pada tahun 2007 jumlah balita gizi buruk turun menjadi 14 kasus dan gizi kurang 30 kasus dari 48 170 balita (0.03%). Pada tahun 2003 angka GAKY (TGR).

Tabel 2. Skor Pola Pangan Harapan Aktual berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Lampung Barat Tahun 2007

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1 218.0	62.6	59.8	0.5	31.3	29.9	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	57.0	2.9	2.8	0.5	1.5	1.4	2.5	1.4
3	Pangan Hewani	162.0	8.3	8.0	2.0	16.6	15.9	24.0	15.9
4	Minyak dan lemak	211.2	10.8	10.4	0.5	5.4	5.2	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	14.4	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4
6	Kacang-kacangan	111.0	5.7	5.5	2.0	11.4	10.9	10.0	10.0
7	Gula	94.1	4.8	4.6	0.5	2.4	2.3	2.5	2.3
8	Sayur dan Buah	76.6	3.9	3.8	5.0	19.7	18.8	30.0	18.8
9	Lain-lain	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total		1 946.9	100	95.6	11.5	88.7	84.8	100	78.8

Sumber: BKP Propinsi Lampung (2007)

Total *Goites Rate* adalah sebesar 22.35% jauh di atas target sebesar <5%, sedangkan tahun 2005 tidak ada data. Untuk tahun 2006 persentase desa dengan garam beryodium baik sebesar 83.05%, tahun 2007 sebesar 84.58%. Hasil pemantauan anemi gizi besi tahun 2004 sebesar 69.7%, pada tahun 2005 terjadi penurunan angka anemi gizi besi sebesar 8% menjadi 61.7% (Tabel 3). Angka ini jauh di atas standar nasional yang hanya 20%. Dari uraian beberapa indikator status gizi tersebut di atas menunjukkan bahwa status gizi di Lampung Barat masih bermasalah (Dinas Kesehatan Lampung Barat, 2007).

Analisis Lingkungan Strategis

Untuk melihat kondisi lingkungan strategis ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat, dilakukan analisis SWOT. Langkah pertama yang dilakukan adalah perumusan faktor internal dan eksternal. Kekuatan (*strengths*) faktor internal 1) potensi sumber daya lahan; 2) kebijakan pembangunan ketahanan pangan; 3) lembaga struktural ketahanan pangan; 4)

adanya lembaga koordinasi ketahanan pangan. Kelemahan (*Weaknesses*) lingkungan internal; 1) kualitas dan kuantitas aparatur belum memadai; 2) infrastruktur pedesaan belum memadai; 3) rendahnya Kualitas sumber daya manusia; 4) penguasaan teknologi budi daya pangan rendah.

Peluang (*Oportunities*) faktor eksternal; 1) pengembangan kelembagaan pangan masyarakat 2) adanya kebijakan program ketahanan pangan pusat; 3) potensi tenaga kerja tinggi 4) adanya kelembagaan gizi dan kesehatan masyarakat. Ancaman (*Threats*) Faktor eksternal; 1) laju pertumbuhan penduduk tinggi; 2) masih tingginya jumlah rumah tangga miskin; 3) tingginya harga sarana produksi pertanian; dan 4) adanya kecenderungan masalah gizi dan kesehatan. Dari evaluasi faktor internal (IFE) dan faktor eksternal (EFE), posisi ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat berada pada kuadran II, mendukung strategi diversifikasi, dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk menanggulangi permasalahan (ancaman) yang ada.

Tabel 3. Indikator Status Gizi Tahun 2004 - 2007

Tahun	Total Penduduk	Jumlah Balita	Jumlah Balita Dengan				
			Gizi Buruk	Gizi Kurang	BBLR	GAKY	PV.FE
2004	388 113	45 409	10	59	-	-	69.7%
2005	393 520	46 041	19	37	14	-	61.7%
2006	388 113	46 708	43	62	18	83.05%	-
2007	405 023	48 170	14	30	37	84.58%	-

Sumber : Dinas Kesehatan LB (2007)

Tabel 4. Evaluasi Faktor Internal (IFE) dan Faktor Eksternal (EFE)

	Uraian Faktor-Faktor Internal dan Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Faktor Internal				
1. Kekuatan (Strengths)/S				
Potensi sumber daya lahan	0.42	5	2.10	
Kebijakan ketahanan pangan	0.23	4	0.92	
Lembaga struktural Ketahanan Pangan	0.23	4	0.92	
Adanya lembaga koordinasi ketahanan pangan	0.12	3	0.36	4.30
2. Kelemahan (Weaknesses)/W				
Kualitas dan kuantitas aparatur belum memadai	0.53	3	1.59	
Infrastruktur Pedesaan Belum Memadai	0.10	4	0.40	
Rendahnya Kualitas sumberdaya manusia	0.20	3	0.60	
Penguasaan teknologi budidaya pangan rendah	0.17	4	0.68	3.27
Total Skor Faktor Kekuatan - Kelemahan				1.03
Faktor Eksternal				
3. Peluang (Oportunities)/O	0.24	4	0.96	
Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat	0.38	3	1.14	
Adanya Kebijakan Program Ketahanan Pangan Pusat	0.23	4	0.92	
Potensi Tenaga Kerja Tinggi	0.15	3	0.45	
Adanya kelembagaan gizi dan kesehatan masyarakat				3.47
4. Ancaman (Threats)/T	0.08	4	0.32	
Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi	0.45	4	1.80	
Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.	0.34	3	1.02	
Tingginya Harga Sarana Produksi Pertanian	0.13	3	0.39	
Adanya kecenderungan masalah gizi dan kesehatan				3.53
Total Skor Faktor Peluang - Ancaman				-0.06

Tabel 5. Urutan Prioritas Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Bobot	Persentase	Prioritas
1	Pengembangan teknologi budidaya	0.1360	14	2
2	Pengembangan sarana prasarana	0.1338	13	3
3	Pengembangan lumbung pangan	0.0980	10	6
4	Pengembangan SDM	0.1759	18	1
5	Penanganan kemiskinan	0.0588	6	9
6	Pengembangan teknologi pengolahan pangan	0.1284	13	4
7	Peningkatan pelayanan kesehatan	0.0911	9	7
8	Kompetensi aparatur daerah	0.1030	10	5
9	Tupoksi	0.0740	7	8

Dengan memadukan faktor kekuatan (*Strengths*) lingkungan internal dengan faktor ancaman (*Weaknesses*) lingkungan eksternal dihasilkan 2 strategi yaitu: 1) melaksanakan revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumber daya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan 2) mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor utama yang harus dilakukan dalam pembangunan ketahanan pangan, yang didukung oleh kebijakan lainnya. Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) berada pada prioritas ke-8 ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penghayatan tupoksi oleh masing-masing satuan kerja belum melembaga, sehingga perlu pengkajian ulang mengenai tupoksi yang kaitannya dengan pembangunan ketahanan pangan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lampung Barat. Penanganan kemiskinan berada pada prioritas ke-9, menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat belum konsisten, perlu peningkatan pemahaman dan penghayatan tentang visi, misi dan strategi pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 - 2012, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rumusan Kegiatan Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan dan Gizi untuk mencapai fokus/tujuan pembangunan ketahanan pangan, dengan memperhatikan keragaan ketahanan pangan, rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007 - 2012, dan arahan kebijakan umum ketahanan pangan 2006-2009, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 100 pada tahun 2015 (padi-padian 275 gr, umbi-umbian 100 gr, pangan hewani 150 gr, kacang-kacangan 35 gr, sayur dan buah 250 gr).
2. Meningkatnya kemandirian pangan melalui swasembada beras berkelanjutan, jagung dan daging sapi (pada tahun 2010).
3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
4. Berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan kronis (konsumsi kurang dari 80% AKE) minimal 2% pertahun.
5. Meningkatnya jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran ke seluruh desa (pekon).
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pustu dan posyandu.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Melaksanakan revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumber daya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan.
2. Mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan dirumuskan beberapa kebijakan operasional yaitu:

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Pengembangan teknologi budidaya
3. Pengembangan sarana prasarana pertanian
4. Pengembangan teknologi pengolahan pangan
5. Kompetensi aparatur daerah
6. Pengembangan lumbung pangan
7. Peningkatan pelayanan kesehatan
8. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)
9. Penanganan kemiskinan

KESIMPULAN

Ketersedian pangan dalam bentuk energi dan protein pada tahun 2007 secara kuantitas menunjukkan keragaan lebih dari cukup, yaitu

sebesar 3 101 kkal (140% AKE) dan 74.28 gram protein (130% AKP).

Kondisi sarana prasarana di Kabupaten Lampung Barat belum mendukung kinerja sub-sistem distribusi pangan. Perkembangan harga pangan pokok strategis rata-rata selama tahun 2006 - 2008, di Kabupaten Lampung Barat cenderung stabil, kecuali harga daging dan ikan cenderung naik, dan harga cabe merah berfluktuatif.

Konsumsi pangan di Kabupaten Lampung Barat secara kuantitas telah mencapai 1 946.9 kkal/kap/hari (95.6% AKE), secara kualitas baru mencapai skor PPH sebesar 78.8.

Masih terdapat kasus gizi buruk dan gizi kurang yang cenderung meningkat, di tahun 2004 sejumlah 10 kasus, gizi kurang 59 kasus dari 45 409 jumlah balita; Pada tahun 2005 jumlah gizi buruk 19 kasus, gizi kurang 37 kasus dari 46 041 jumlah balita; Pada tahun 2006 jumlah gizi buruk 43 kasus, gizi kurang 62 Kasus dari 46 708 jumlah balita; Pada tahun 2007 jumlah gizi buruk 14 kasus, gizi kurang 30 kasus dari 48 170 jumlah balita.

Strategi pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat adalah strategi diversifikasi, dengan memaksimalkan kekuatan untuk menanggulangi ancaman yang mungkin timbul, yaitu: a) melaksanakan revitalisasi pertanian perikanan, kehutanan dengan potensi sumberdaya lahan yang ada dalam rangka pengentasan kemiskinan; b) mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan.

Rekomendasi kebijakan operasional ketahanan pangan berdasarkan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah: a) pengembangan sumber daya manusia, b) pengembangan teknologi budidaya, c) pengembangan sarana prasarana pertanian, d) pengembangan teknologi pengolahan pangan, e) kompetensi aparat daerah, f) pengembangan lumbung pangan, g) peningkatan pelayanan kesehatan, h) Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan i) penanganan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi Dalam Ketahanan Pangan. Dalam

Soekirman (Ed.), Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, 17-19 Mei. LIPI, Jakarta.

[BPS] Badan Pusat Statistik Lampung Barat. 2007. Lampung Barat Dalam Angka, Kabupaten Lampung Barat.

Badan Ketahanan Pangan Lampung Barat. 2008. Laporan Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis. BKP, Lampung Barat.

Badan Ketahanan Pangan Lampung Barat. 2008. Neraca Bahan Makanan 2007. BKP, Kabupaten Lampung Barat.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. 2007. Laporan Analisis dan Pemetaan Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007. BKP, Lampung Barat.

Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009. Dewan Ketahanan Pangan, Jakarta.

Dinas Kesehatan Lampung Barat. 2007. Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Dinkes, Lampung Barat

Marimin. 2004. Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

[PERDA] Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2007-2012.

[PP No. 38/2007] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota; Jakarta.

[PP No.68/2002] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Jakarta.

[UU No. 7/1996]. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.